HADAPI TIM DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Hasto Pastikan Sampah Kota Yogya Tertangani

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Hasto Wardoyo memastikan seluruh sampah yang diproduksi masyarakat berhasil tertangani. Kepastian tersebut sekaligus untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi ketika Kementerian Lingkungan Hidup menerjunkan tim penyidik untuk menyelidiki masalah persampahan di Kota Yogya.

Hasto menyebut, dalam melakukan penanganan sampah pihaknya juga selalu menjalankan arahan dari Gubernur DIY. Koordinasi yang melibatkan lintas daerah juga kerap dilakukan seiring Kota Yogya sebagai daerah aglomerasi. "Sudah jelas kan di Yogya ini kita mengikuti arahan Provinsi DIY. Seperti kita gunakan yang di Piyungan itu kemudian juga insinerator," tegasnya, Senin (21/4).

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizol Nurofiq, dalam lawatannya ke Kulonprogo pada Sabtu (19/4) lalu sempat menyinggung permasalahan sampah di Kota Yogya. Menurutnya tim penyidik akan diterjunkan mulai pekan depan guna menelusuri masalah sampah tersebut. Terutama mendalami proses penanganan sampah dari depo hingga titik akhir, apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

Menanggapi hal tersebut Hasto kembali menegaskan saat ini sudah tidak ada tumpukan sampah di depo-depo seperti pekan-pekan sebelumnya. Penanganan sampah yang dilakukannya pun sudah riil time. Artinya, sampah yang diproduksi hari ini sudah bisa ditangani hari ini pula. "Sekarang ini kan rata-rata 300 ton perhari. Itu semua kita kelola dan semuanya jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Semua sudah teralokasikan ke mana-mananya," urainya.

Oleh karena itu jika tim penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup hendak menelusuri kemana alur sampah yang dikelola, maka hal tersebut akan dipersilakan. Pemkot tidak akan pernah menutup-nutupi dan justru selalu bersifat terbuka.

Proses penanganan sampah di Kota Yogya, imbuh Hasto, melalui berbagai metode. Misalnya di TPS 3R Nitikan yang lebih mengedepankan proses pemilahan, pemotongan hingga pengepresan untuk pembuatan keripik sampah sebagai alternatif bahan bakar atau RDF. Begitu pula yang di Kranon dan Karangmiri.

Selain itu metode pembakaran sampah melalui insinerator juga dilakukan di komplek Terminal Giwangan dan TPST Piyungan. Terdapat dua alat insinerator di Giwangan dan lima unit di TPST Piyungan. Dari semua proses atau metode tersebut, memang belum semua mampu dikelola oleh Pemkot Yogya. Sehingga kerja sama dengan pemda terkait juga turut dilakukan.

"Dari itu kalau masih ada yang belum terkelola, maka kita kerja samakan di Bantul, tepatnya di Panggungharjo. Ini sudah jalan. Besok akan kita tambah lagi kerja sama di Bawuran. Jadi sekali lagi, semua sudah teralokasikan," tandasnya. **(Dhi)-f**

Tantangan Pemberdayaan Perempuan di Era Modern

YOGYA (KR) - Lebih dari seabad lalu, Raden Ajeng Kartini menorehkan sejarah dengan gagasan radikal tentang pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Hari ini, di tengah dunia yang serba digital dan dinamis, semangat Kartini tetap hidup, tetapi tantangan yang dihadapi perempuan justru kian kompleks dan multidimensional.

Epsilandri Septyarini SE MM CPHRM, Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa menuturkan, memang, perempuan kini memiliki akses lebih besar ke pendidikan, dunia kerja, dan ruang publik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan belum usai.

"Kesenjangan upah, beban ganda antara karier dan rumah tangga, keterwakilan perempuan yang masih minim dalam kepemimpinan strategis, serta maraknya kekerasan berbasis gender adalah cermin dari tantangan struktural yang membelenggu perempuan di era modern," katanya, Senin (21/4).

Menurut Epsilandri, fenomena 'glass ceiling' (batas tak kasat mata yang menghalangi perempuan mencapai puncak karier) masih membayangi banyak organisasi. Sementara itu, era digital menghadirkan bentuk baru kekerasan, yaitu cyber harassment, yang mengancam ruang aman perempuan di media sosial. "Dunia profesional tidak boleh menutup mata. Pemberdayaan perempuan harus menjadi strategi organisasi, bukan sekadar jargon," ujarnya.

Dijelaskan, melalui pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Manajemen Strategik, beberapa langkah konkret perlu diupayakan. Seperti kebijakan kesetaraan gender, dimana sistem rekrutmen, promosi, dan kompensasi berbasis kompetensi, bukan bias. Selain itu fleksibilitas kerja dan dukungan keluarga juga diperlukan dengan menyediakan skema kerja fleksibel, cuti melahirkan yang adil, serta fasilitas penitipan anak untuk mendukung peran ganda perempuan.

Langkah selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan perempuan melalui program mentoring, pelatihan kepemimpinan, dan talent pipeline yang mendukung kemajuan karier perempuan. Tak kalah penting adalah zero tolerance terhadap pelecehan dengan membangun sistem pengaduan yang aman, efektif, dan berpihak pada korban.

"Lebih dari sekadar strategi organisasi, pemberdayaan perempuan adalah tanggung jawab kebangsaan. Ajaran Tamansiswa 'Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani', mengajarkan bahwa perempuan harus diberdayakan menjadi pemimpin, penggerak, sekaligus pendukung dalam membangun peradaban bangsa," ujarnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, kata Epsilandri, pembahasan RUU Kesetaraan Gender dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah ujian serius. "Apakah kita benar-benar berkomitmen pada cita-cita Kartini, ataukah hanya memperingatinya sebatas seremoni tahunan ?," katanya. **(Dev)-d**

SULTAN LANTIK 3 PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Regenerasi ASN Menjadi Semangat Rekalibrasi Energi Birokrasi

KR-Istimewa

Sri Sultan HB X saat melantik ketiga Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda DIY.

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik tiga Pimpinan Tinggi Pratama di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Senin (21/4). Regenerasi berkelanjutan di tubuh ASN diharapkan mampu menjadi semangat rekalibrasi energi birokrasi. Selain itu pengambilan sumpah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah wujud keberlanjutan estafet kepemimpinan, sekaligus upaya memastikan kesinambungan dan daya tanggap roda pemerintahan terhadap perubahan zaman. Proses itu bukan hanya seremonial tetapi menjadi tonggak dalam menghadapi tantangan global dan nasional yang semakin kompleks.

"Regenerasi (ASN) bukan semata urusan usia, tetapi soal rejuvenasi atau penyegaran nilai, cara pandang, dan kapasitas kepemimpinan. Regenerasi menjadi semangat rekalibrasi energi birokrasi agar organisasi mampu bergerak lebih gesit, responsif, dan adaptasi di tengah dinamika era disrupsi, transisi energi, krisis iklim. Serta penetrasi teknologi berbasis AI, yang mengubah wajah pelayanan publik secara mendasar," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (21/4).

Ketiga Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda DIY yang dilantik adalah Chrestina Erni Widyastuti yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bandiklat DIY, kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan DIY. Amin Purwani dari jabatan sebagai Kepala BKD DIY, dilantik menjadi Kepala Bandiklat DIY. Sedangkan Hari Setiawan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, kini menjadi Kepala BKD DIY.

Sultan menegaskan, bagi pejabat yang dilantik, mereka bukan sekedar kepala OPD, tetapi seorang pemimpin sekaligus manager. Apalagi dalam perspektif global saat ini, kepemimpinan menjadi penentu efektivitas dan inovasi. Sedangkan sisi manajerial menjadi pendorong efisiensi dan ketepatan sasaran.

"Seorang pemimpin bekerja melahirkan filosofi, visi, dan sistem nilai yang transformatif. Sementara manajer, menyusun strategi struktur dan eksekusi yang presisi. Kedua peran ini harus menyatu dan melekat dalam satu sosok yang mampu menjawab tantangan zaman," imbuh Sri Sultan.

Sultan menambahkan, dalam melaksanakan misi Pancamulia DIY, para pejabat ini harus mampu menyusun arah strategi pembangunan. Dalam pelaksanaannya pun dibutuhkan model silang OPD, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi silang OPD ini menjadi penting karena saat ini sedang memasuki era kolaborasi dan konvergensi.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti yang ditemui usai pelantikan menyatakan, dengan dilantik pada jabatan baru, dirinya harus sudah siap dengan dampaknya, termasuk menyelesaikan persoalan yang ada terkait OPD baru yang dipimpinnya. Dimana persoalan penataan kantong parkir Abu Bakar Ali menjadi agenda terdekat untuk segera diselesaikan.

"Kami sadar, salah satu tujuan pengisian jabatan ini untuk mempercepat penyelesaian terkait Abu Bakar Ali. Tentu kami akan berkoordinasi terlebih dulu, dan mendengar bagaimana arahan pimpinan, baru bisa atur strategi lebih lanjut agar ada percepatan penyelesaian," terangnya. **(Ria)-d**

LHP ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2024

Kulonprogo Raih WTP Ke-12 Kali

KR-Asrul Sani

Bupati Kulonprogo Agung Setyawan menerima LHP atas LKPD TA 2024 dari Kepala Perwakilan Provinsi DIY BPK RI, Agustin Sugihartatik disaksikan Ketua DPRD setempat, Aris Syarifudin.

KULONPROGO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. LKPD Pemkab Kulonprogo TA 2024 dinyatakan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keduabelas kalinya.

Bupati Kulonprogo Dr R Agung Setyawan ST MSc MM menyatakan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajarannya. "Capaian WTP sebagai motivasi serta upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel," tegas Agung di ruang kerjanya, Wates, Senin (21/4).

LHP diserahkan langsung Kepala Perwakilan Provinsi DIY BPK RI, Agustin Sugihartatik SE MM GRCP GRCA CSFA ERMAP ChFA dan diterima Bupati Agung Setyawa di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Kamis (17/4).

Nampak hadir dalam penyerahan LHP tersebut, Ketua DPRD Aris Syarifuddin, Sekretaris Daerah (Sekda) Triyono SIP MSi, Inspektur Daerah Arif Prastowo, Asisten Administrasi Umum, Eko Wisnu Wardhana SE dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo, Taufik Amrullah MM.

Agung Setyawan berharap pencapaian ini dimaknai sebagai tantangan bagi Kulon Progo untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian dari penilaian LKPD. ìIni sebuah tantangan bagi kita untuk tetap minimal mempertahankan, syukur meningkatkan responsibilitasnya terhadap capaian ini,î tuturnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Provinsi DIY BPK RI Agustin Sugihartatik menjelaskan, pemeriksaan LKPD berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan juga dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai prosedur pemeriksaan.

Ditambahkan pemberian opini WTP atas LKPD didasarkan atas empat kriteria, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengungkapan yang cukup atau *adequate disclosures*.

"Kami mengapresiasi Kepala Daerah dan jajarannya serta DPRD sehingga bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujar Agustin menambahkan capaian opini WTP menunjukkan komitmen DPRD dan bupati menerapkan praktik pengelolaan laporan keuangan yang terbaik. **(Rul)-d**

KR-Asrul Sani

Usai menerima LHP atas LKPD TA 2024, Bupati Kulonprogo Agung Setyawan (empat kiri) dan Ketua DPRD setempat Aris Syarifudin (enam kiri) foto bersama Kepala Perwakilan Provinsi DIY BPK RI, Agustin Sugihartatik (lima kiri).

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
Jl. Argolubang No. 13 Baciro, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 54774, Faksimile : (0274) 512447
Pos-el:kphjogja13@gmail.com, Laman: www.dlhk.jogjaprov.go.id

PENGUMUMAN
RENCANA PRODUKSI MINYAK KAYU PUTIH
KEGIATAN PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTANA PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
PADA BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
TAHUN 2025

Nomor : B.500.4/405/D5.4 — Yogyakarta, 09 April 2025
Lampiran : -
Perihal : Informasi Rencana Produksi Minyak Kayu Putih

Kepada Yth.
CALON PEMBELI
MINYAK KAYU PUTIH PADA BALAI KPH YOGYAKARTA
DI TEMPAT

Bersama ini kami pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada tahun tahun 2025, menginformasikan rencana Produksi Minyak Kayu Putih pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta kepada Bapak/Ibuk/Warga Masyarakat pengguna Minyak Kayu Putih, sebagai berikut:

1. Rencana Produksi Minyak Kayu Putih tahun anggaran 2025 sebanyak 20.000 liter
2. Waktu Pelaksanaan Produksi akan dimulai pada bulan Juni s/d bulan Oktober tahun 2025
3. Syarat pembeli adalah Badan Hukum/Badan Usaha dan/atau Perseorangan, Serta Memiliki NPWP
4. Harga minyak Kayu Putih per liter sesuai Pergub No. 3 Tahun 2024 Sebesar Rp.123.860, belum termasuk PPn (11%)
5. Syarat dan ketentuan lain untuk melakukan pembelian minyak kayu putih dapat berhubungan langsung dengan pelaksana kegiatan:
   - Tempat dan Alamat:
     Balai KPH Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
     Jl. Argulobang No. 13 Baciro, Yogyakarta
   - Telepon : (0274) 547740
   - Weibset : dlhk.jogjaprov.go.id

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan apabila berminat akan melakukan pembelian dan/atau memerlukan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi pelaksana kegiatan.

Mengetahui:
Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan
Yogyakarta

Sabam Benedictus Silalahi, S.Hut., M.P.
NIP. 197007281997031002

Pelaksana Kegiatan,

Supriyono, S.P.
NIP. 196808091992031005